

PERENCANAAN BIDANG KESEHATAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM UPAYA
PERCEPATAN PROGRAM VAKSINASI NASIONAL COVID-19
TAHUN 2021

Health and Health Planning of The North Sumatra Regional Police in The
Effort to Accelerate The National Covid-19 Vaccination Program in 2021

DEWI MIRAKIRANA¹, SRI MELDA BR BANGUN²
^{1,2}INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM

Jln. Sudirman No.38 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara – Indonesia

*email korespondensi author: dewimirakirana873@gmail.com

Abstrak

Corona virus merupakan golongan virus corona yang menyerang manusia, dimana awal mula penyakit ini ditemukan di Wuhan dan sampai di Indonesia perkiraan akhir 2019. Untuk menekan angka penularan covid-19 pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin, salah satunya dengan mengadakan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Biddokkes dalam hal ini bertugas sebagai pelaksana percepatan program vaksinasi nasional covid-19 melakukan beberapa Langkah kerja seperti menerapkan perencanaan. Dalam menekan angka penularan covid-19 pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi agar dapat melindungi warganya. Pemberian vaksin bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat virus. Vaksin dapat menurunkan efek dari gejala berat dan komplikasi akibat Covid-19. Metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data kualitatif didukung dengan data arsip terkait jumlah vaksinator, target percepatan vaksin dan realisasi vaksinasi di wilayah kerja Bidokkes di Sumatera Utara. Perencanaan Biddokkes Polri beranggotakan polri dengan pangkat dan ketentuan kerja memiliki kewenangannya masing-masing. Perencanaan percepatan program vaksinasi nasional covid-19 tahun 2021 di Bidokkes melibatkan seluruh SDM dalam struktur organisasi Bidokkes. Dari Operator, Dokter Skringing, Vaksinator, dan juga jajaran pimpinan di Bidokkes. Perencanaan meliputi pendataan jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi, Pendataan (jumlah vaksin, jumlah SDM, jumlah transportasi dan jumlah transportasi cadangan (Di Ditlantas dan Biro Logistik dan Brimob); Pendataan sarana dan prasarana Biddokkes dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi serta sarana dan prasarana cadangan (Yanma Mapolda Sumut dan Biro Logistik Polda Sumut).

Kata Kunci: Covid-19; Biddokes Polri; Vaksin Covid-19

Abstract

Corona virus is a group of corona viruses that attack humans, where the disease was first discovered in Wuhan and arrived in Indonesia at the end of 2019. To reduce the number of Covid-19 transmission, the Indonesian government is trying its best, one of which is by holding mass vaccinations

organized by the government. Biddokkes, in this case, has the task of implementing the acceleration of the COVID-19 national vaccination program, carrying out several work steps, such as implementing planning. In suppressing the transmission of COVID-19, the Indonesian government requires the public to take vaccinations in order to protect their citizens. Vaccination aims to reduce mortality due to the virus. Vaccines can reduce the effects of severe symptoms and complications due to Covid-19. Qualitative method with case study design. Qualitative data is supported by archival data related to the number of vaccinators, vaccine acceleration targets and vaccination realization in the Bidokkes working area in North Sumatra. The planning of Biddokkes Polri consists of members of the National Police with their respective ranks and terms of work. Planning for the acceleration of the 2021 COVID-19 national vaccination program at Bidokkes involves all human resources in the Bidokkes organizational structure. From Operators, Screening Doctors, Vaccinations, and also the leadership at Bidokkes. Planning includes data collection on the number of people who will receive vaccination, data collection (number of vaccines, number of human resources, number of transportation and number of backup transportation (at Ditlantas and Logistics Bureau and Brimob); data collection on Biddokkes facilities and infrastructure in the implementation of vaccination activities as well as backup facilities and infrastructure (Yanma North Sumatra Police Headquarters and North Sumatra Police Logistics Bureau).

Keywords: Hand Sanitizer; Bay Leaf Extract; Hand Wash

1. PENDAHULUAN

Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Covid-19 pertama kali menyebar dari kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019 (WHO, 2020). Kasus Covid-19 pertama, diumumkan oleh WHO di China pada 31 Desember. Pada mulanya, penyakit ini diklaim sebagai pneumonia misterius dikarenakan gejalanya adalah shu tubub naik, susah bernapas, dan adanya lesi pada paru-paru. Penyakit ini mirip dengan wabah SARS yang terjadi di Asia pada 2002. Hingga Januari 2020, Covid-19 telah menulari 2.000 orang lebih di 13 negara berbeda. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan saat itu pada tanggal 2 Maret 2020. Dua orang positif pertama Covid-19 ini sempat berinteraksi dengan warga Jepang yang datang ke Indonesia.

Sejalan dengan penyebaran covid-

19 global, penyebaran Covid-19 di Indonesia juga mengalami peningkatan. Hingga tanggal 13 Juli 2021, kasus Covid-19 di Indonesia telah sampai pada angka 2.615.529 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 68.219 kasus (2,6%). Meskipun setiap negara, bahkan dunia internasional dibawah WHO telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan peraturan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, pada faktanya di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada faktanya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan proses sesuai anjuran pemerintah, sehingga penularan virus semakin naik. (Heryana Ade, 2020)

Dalam menekan angka penularan covid-19 pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi agar dapat melindungi

warganya. Pemberian vaksin bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat virus. Vaksin dapat menurunkan efek dari gejala berat dan komplikasi akibat Covid-19. Vaksinasi bertujuan dalam membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok (Nareza, 2021).

TNI-Polri dilibatkan dalam penanganan covid-19 yang mana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Kepolisian NKRI Nomor 14 Tahun 2018 dan InPres No. 4 Tahun 2019 mengenai penanganan pandemik. Dalam operasi non-militer, peranan aparat bersenjata dikenal sebagai tugas perbantuan dalam merespons situasi darurat ketika masyarakat memiliki keterbatasan dalam penanggulangannya (Khoirunnisa, 2021).

2. Metode

Metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data kualitatif didukung dengan data arsip terkait jumlah vaksinator, target percepatan vaksin dan realisasi vaksinasi di wilayah kerja Bidokkes di Sumatera Utara. Jumlah populasi sekaligus sampel adalah 7 orang Informan. Pengumpulan data diperoleh secara langsung melalui informan (sampel).

1) Tahap persiapan

Menyiapkan bahan wawancara dan bahan pendukung lainnya. Maksud dari penelitian ini pada masing-masing informan.

2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri, menjelaskan bahan, pencatatan hasil wawancara dan merekam hasil wawancara.



Gambar 1. Wawancara dengan informan 2

3) Evaluasi dan Tindak Lanjut

Mendokumentasikan hasil wawancara dan perumusan matrix wawancara yang telah ditanyakan pada informan.

3. HASIL

Dalam perencanaan percepatan program vaksinasi nasional covid-19 tahun 2021 di Bidokkes melibatkan seluruh SDM dalam struktur organisasi Bidokkes. Dari operator, dokter Skrining, vaksinator, dan juga jajaran pimpinan di Bidokkes yang terlibat langsung. Perencanaan mencakup : 1. Mendata jumlah sasaran vaksin. 2. Mendata jumlah ketersediaan vaksin. 3. Mendata jumlah ketersediaan tenaga vaksinator yang ada di biddokkes dan jumlah sdm cadangan yang sewaktu waktu dapat dikerahkan. 4. Mendata jumlah transportasi yang tersedia di Biddokkesa Polda Sumut dan Jumlah Transportasi Cadangan (Di Ditlantas dan Biro Logistik dan Brimob) yang sewaktu waktu dapat di pergunakan. 5. Mendata Sarana dan prasarana Biddokkes dalam pelaksanaan Kegiatan vaksinasi seperti jaringan internet serta sarana dan prasarana Cadangan (Yanma Mapolda Sumut sdan Biro Logistik Polda Sumut) yang sewaktu waktu dapat di pergunakan, 6. Monitoring jumlah vaksin di kewilayahan, monitoring mobilisasi vaksin, monitoring jumlah capaian vaksinasi melalui komunikasi dua (2) arah.



Gambar 2. Wawancara dengan informan 5

PEMBAHASAN

Penelitian oleh Heryana (2020) menjelaskan bahwa dalam menjalankan langkah-langkah program kesehatan seperti program perencanaan percepatan program vaksinasi nasional covid-19 tahun 2021 harus dilakukan penilaian apakah langkah-langka yang dilakukan oleh pihak Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Sumatera Utara memiliki kendala, sehingga kalau pun kendala terjadi akan dapat diatasi dengan cara yang sistematis oleh karena identifikasi dan penilaian yang baik.

Polri menjalankan tugasnya dalam perencanaan percepatan program vaksinasi nasional covid-19 tahun 2021 telah mendapatkan perlindungan hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pepres No. 33 Tahun 2022 mengenai Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 sudah ditunjuk sebagai pelaksana dalam menjalankan program kesehatan vaksinasi covid-19.

Jika dalam menjalankan tugasnya polri menjumpai calon penerima vaksin covid-19 yang tidak memiliki data kependudukan yang tertera sebagaimana syarat penerima vaksin, maka polri sebagai pelaksana dapat menjatuhkan keputusan langsung dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan administrative yang berlaku dilapangan.

KESIMPULAN

Perencanaan percepatan program vaksinasi nasional covid-19 tahun 2021 di Bidokkes melibatkan seluruh SDM dalam struktur organisasi Bidokkes. Dari Operator, Dokter Skrining, Vaksinator, dan juga jajaran pimpinan di Bidokkes. Perencanaan meliputi pendataan jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi, Pendataan (jumlah vaksin, jumlah SDM, jumlah transportasi dan

jumlah transportasi cadangan (Di Ditlantas dan Biro Logistik dan Brimob); Pendataan sarana dan prasarana Bidokkes dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi serta sarana dan prasarana cadangan (Yanma Mapolda Sumut dan Biro Logistik Polda Sumut).

DAFTAR PUSTAKA

- Heryana, Ade. (2020). Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat. Universitas Esa Unggul.
- Khoirunnisa, Jihaan. (Senin, 09 Agu 2021). Peran TNI-Polri Jadi Tracer & Vaksinator Saat Pandemi.
- Nareza, M. (2021). Jangan Termakan Isu, Ini Fakta Penting Vaksin COVID19.
- Peraturan Kepolisian NKRI No.14. 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33. 2022. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan pandemi corona disease 2019
- Presiden Republik Indonesia N0m0r 4 tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, Dan merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, Dandedaruratan Nuklir, Biologi, Dan Kimia
- WHO (World Health Organization). (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report-94.